

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kemiskinan di perkotaan, terutama yang terjadi di Indonesia pada dasarnya bermula dari terjadinya kemiskinan di pedesaan. Menurut sejumlah ahli, masalah tenaga kerja dan urbanisasi menciptakan kemiskinan di perkotaan berkaitan erat dengan munculnya kemiskinan di pedesaan. Kemiskinan di pedesaan dibuktikan dengan menurunnya jumlah penduduk yang tetap bekerja sebagai petani dan buruh tani.

Kondisi tersebut mengakibatkan arus urbanisasi tidak bisa dihindari. Dengan tidak ada lagi lahan pekerjaan di desa membuat kota diisi orang-orang desa dengan kultur agraris. Para petani melakukan urbanisasi ke kota dan memilih pekerjaan baru di perkotaan pada dasarnya telah terjadi penyesuaian struktural. Dalam kasus migrasi contohnya saat di pedesaan memiliki pekerjaan sebagai petani, dengan latar belakang orang-orang desa yang berkultur agraris itu akan berbenturan dengan gaya kehidupan industri di perkotaan. Hal itu, tentu bertolak dari kenyataan bahwa tidak semua penduduk kota terlibat atau memperoleh pekerjaan dari pabrik, atau perusahaan, atau kantor pemerintah, yang disebut sektor formal. Justru banyak penduduk kota yang tertampung di sektor bukan formal, atau disebut juga dengan sektor informal.<sup>1</sup>

Migrasi memperburuk ketidakseimbangan struktural antara desa dan kota secara langsung dalam dua hal. *Pertama*, di sisi penawaran, migrasi internal secara berlebihan akan meningkatkan jumlah pencari kerja di perkotaan yang melampaui tingkat atau batasan pertumbuhan penduduk, yang sedianya masih dapat didukung oleh segenap kegiatan ekonomi atau jasa-jasa pelayanan yang ada di daerah perkotaan. Kehadiran para pendatang tersebut cenderung melipat gandakan tingkat penawaran tenaga kerja di perkotaan,

---

<sup>1</sup> Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith, *Pembangunan Ekonomi*, Erlangga, Jakarta, 2006, hlm. 396.

sementara persediaan tenaga kerja yang sangat bernilai di pedesaan semakin menipis. *Kedua*, di sisi permintaan, penciptaan kesempatan kerja di daerah perkotaan lebih sulit dan jauh lebih mahal dari pada penciptaan lapangan kerja di pedesaan, karena kebanyakan jenis pekerjaan sektor-sektor industri di perkotaan membutuhkan aneka input-input komplementer yang sangat banyak jumlah maupun jenisnya.

Dengan demikian, sebagai akibat dari begitu cepatnya peningkatan penawaran tenaga kerja dan tertinggalnya tingkat pertumbuhan permintaan tenaga kerja, maka pada akhirnya hal tersebut akan mengubah masalah ketidakseimbangan tenaga kerja yang semula hanya bersifat jangka pendek menjadi suatu masalah yang sangat kronis dan bersifat jangka panjang melalui terciptanya surplus tenaga kerja perkotaan secara berlebihan sehingga tidak dapat diserap.

Namun, dampak negatif yang ditimbulkan oleh migrasi terhadap proses pembangunan ternyata lebih luas daripada sekedar memperburuk kondisi maupun tingkat pengangguran di perkotaan, baik itu yang terbuka (penuh) maupun yang terselubung.<sup>2</sup>

Dalam beberapa tahun terakhir ini, sektor informal di daerah perkotaan Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang pesat. Menurut para ahli, membengkaknya sektor informal mempunyai kaitan dengan menurunnya kemampuan sektor formal dalam menyerap pertambahan angkatan kerja di kota. Sedangkan pertambahan angkatan kerja di kota yaitu sebagai akibat imigrasi desa-kota lebih pesat daripada pertumbuhan kesempatan kerja. Akibatnya, terjadi pengangguran terutama di kalangan penduduk usia muda dan terdidik dengan membengkaknya sektor informal di kota.

Di daerah perkotaan, sektor informal dianggap mengundang banyak masalah terutama mereka yang beroperasi di tempat strategis di kota. Dimana hal tersebut akan mengurangi keindahan kota dan menjadi penyebab kemacetan lalu lintas serta menurunnya lingkungan hidup kota. Oleh karena itu, pemerintah kota telah mengambil kebijaksanaan membatasi ruang gerak

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 401-402.

sektor informal. Bahkan di kota-kota besar seperti Jakarta, sektor informal mendapat perlakuan yang kurang pantas dari aparat penertiban kota. Contohnya mereka diusir dari tempat mereka berusaha atau alat untuk usaha mereka disita.

Terlepas dari permasalahan tersebut, sesungguhnya sektor informal mempunyai andil yang cukup berarti dalam mengurangi jumlah pengangguran yang berada di kota besar. Hal itu dikarenakan mereka menciptakan lapangan kerja sendiri yang kemudian akan menghasilkan pendapatan yang cukup bagi mereka untuk hidup di kota besar dan bukan menjadi pengangguran yang tidak mempunyai penghasilan.

Menurut Sethuraman yang dikutip oleh Tadjuddin Noer Effendi, berdasarkan survei yang dilakukan di kota-kota Negara Sedang Berkembang (NSB) termasuk Indonesia, didapatkan bahwa kira-kira 20-70% kesempatan kerja terdapat dalam kegiatan kecil-kecilan yang disebut sektor informal.<sup>3</sup>

Lapangan kerja formal yang tersedia mensyaratkan kemampuan dan latar belakang pendidikan tertentu yang sifatnya formal, sehingga tenaga kerja yang tidak tertampung dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya memilih sektor informal. Fakta yang dapat dilihat adalah adanya ketidakmampuan sektor formal dalam menampung tenaga kerja, serta adanya sektor informal yang bertindak sebagai pengaman antara pengangguran dan keterbatasan peluang kerja, sehingga dapat dikatakan adanya sektor informal dapat meredam kemungkinan keresahan sosial sebagai akibat langkanya peluang kerja.<sup>4</sup>

Sektor informal merupakan suatu realitas yang tidak terhindarkan dari wilayah perkotaan. Digambarkannya bahwa sektor informal sebagai bagian dari angkatan kerja kota yang berada di luar pasar tenaga kerja yang terorganisir.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Tadjuddin Noer Effendi, *Sumber Daya Manusia Peluang Kerja dan Kemiskinan*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1995, hlm. 87.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 89.

<sup>5</sup> Ahmad Erani Yustika, *Industrialisasi Pinggiran*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000, hlm. 189.

Islam melalui nas Al-Quran dan sunnah juga menganjurkan dengan keras seseorang berdagang, karena aktivitas berdagang mempunyai manfaat bagi banyak orang yaitu memenuhi kebutuhan orang banyak. Rasulullah juga menjelaskan, yaitu :

عمل عن رافع بن خديج قال: قال: يارسول الله اي الكسب اطيب؟ قال: الرجل بيده وكل بيع مبرور

*Artinya : "Dari Rafi' bin Khadij ia berkata, ada yang bertanya kepada nabi : 'wahai Rasulullah, pekerjaan apa yang paling baik?' Rasulullah menjawab: 'Pekerjaan yang dilakukan seseorang dengan tangannya dan juga setiap perdagangan yang mabrur (baik)' ."( HR. Ahmad di dalam musnad no 16628 ).<sup>6</sup>*

Hadits di atas menjelaskan pekerjaan yang paling baik atau yang paling berkah yaitu pekerjaan yang dilakukan dengan sendiri dan menekuni berbagai aktifitas ekonomi dengan segala bentuknya rangka rangka memenuhi kebutuhan di dunia. Dalam hadits itu juga menjelaskan anjuran untuk melakukan bisnis perdagangan yang baik sesuai dengan syari'at Islam.

Salah satu sektor perdagangan yang banyak di minati adalah sektor informal. Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah salah satu sektor informal yang banyak terdapat di perkotaan.

Kehadiran pedagang kaki lima sering dikaitkan dengan dampak negatif bagi lingkungan perkotaan, dengan munculnya kesan buruk, kotor, kumuh dan tidak tertib. Hal ini ditunjukkan oleh penempatan sarana perdagangan yang tidak teratur dan tertata serta sering menempati tempat yang menjadi tempat umum. Akan tetapi adanya kebutuhan terhadap pedagang kaki lima oleh masyarakat menjadikan keberadaan para pedagang kaki lima pun semakin banyak.

Sektor informal ditandai oleh beberapa karakteristik unik seperti sangat bervariasi dalam bidang kegiatan produksi barang dan jasa berskala

---

6 [https://abufawaz.wordpress.com/2012/04/10/hadits-hadits-shohih-tentang-keutamaan-perniagaan-dan-pengusaha-muslim?\\_e\\_pi\\_=7%2CPAGE\\_ID10%2C1534499653](https://abufawaz.wordpress.com/2012/04/10/hadits-hadits-shohih-tentang-keutamaan-perniagaan-dan-pengusaha-muslim?_e_pi_=7%2CPAGE_ID10%2C1534499653) (diakses pada 2 Oktober 2016, 20.30 WIB)

kecil, unit produksi yang dimiliki secara perorangan atau kelompok, banyak menggunakan tenaga kerja (padat karya), dan teknologi yang dipakai relatif sederhana. Para pekerjanya sendiri biasanya tidak memiliki pendidikan formal, umumnya tidak memiliki keterampilan dan modal kerja. Oleh sebab itu produktivitas dan pendapatan mereka cenderung rendah dibandingkan dengan kegiatan bisnis yang dilakukan di sektor formal.<sup>7</sup> Semua itu dikarenakan modal kerja yang cukup rendah. Jika modal kerja yang digunakan rendah maka pendapatan yang diperoleh juga rendah.

Fenomena Pedagang Kaki Lima (PKL) telah banyak menyita perhatian pemerintah. Karena PKL sering kali dianggap mengganggu ketertiban lalu lintas, jalanan menjadi tercemar, menimbulkan kerawanan sosial dan tata ruang kota yang kacau. Permasalahan berkaitan dengan keberadaan PKL juga dialami oleh pemerintah Kabupaten Kudus. Seperti PKL yang berada di sekitar tempat wisata Menara Kudus, di Alun-alun Simpang Tujuh Kudus, PKL musiman dandangan, PKL di *car free day* dan lain-lain.

Kegiatan *car free day* baru berjalan kurang lebih 2 tahun jadi pemerintah lebih memfokuskan penertibannya pada *car free day*. Untuk PKL yang berada di sekitar wisata Menara Kudus dan Alun-alun Simpang Tujuh karena keberadaannya sudah lama maka sudah ada peraturan penertiban. Sedangkan untuk dandangan yang hanya ada setahun sekali saat mendakati selama bulan puasa maka peraturannya bisa berubah-ubah karena nantinya akan disesuaikan pada tempat berlangsungnya kegiatan dandangan tersebut.

Kegiatan *car free day* ini menyita banyak kalangan baik dari anak-anak maupun orang dewasa. Kegiatan yang dilakukan sepekan sekali pada hari minggu di alun-alun Kudus ini banyak mengundang orang untuk menyempatkan waktu sebentar untuk singgah di alun-alun kudus. Banyak kegiatan yang dilakukan disana seperti bersepeda, senam, bersepatu roda dan tidak jarang juga banyak komunitas yang singgah di acara *car free day* untuk mengenalkan kegiatan di komunitasnya. Banyak komunitas yang bertemu dan saling berbagi informasi. Para anak sekolah maupun mahasiswa juga tidak

---

<sup>7</sup> Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith, *Op. Cit.*, hlm. 393.

mau ketinggalan, mereka saling unjuk gigi menampilkan keahlian masing-masing, seperti bernyanyi, dance, drama dan lain-lain. Pemerintah Kabupaten Kudus juga tidak mau ketinggalan, mereka sering mengadakan hiburan pada waktu *car free day*. Ada banyak juga pemuda-pemudi yang hanya mengobrol saja sambil menikmati keadaan sekitar.

Karena banyak orang-orang yang mengikuti acara *car free day*, maka dimanfaatkan para pedagang kaki lima untuk menjajakan dagangannya. Para pengunjung dapat menikmati berbagai macam makanan yang di jual oleh PKL. Karena sebagian besar dari mereka menjual berbagai macam makanan, terutama menu untuk sarapan, sedangkan yang lainnya menjual dagangan yang bersifat kering seperti baju, sepatu, aksesoris, kerudung, buku dan lain sebagainya.

Saat pertama kegiatan *car free day*, para PKL berdagang sesuka hatinya karena belum ada tempat yang dikhususkan para PKL. Banyak dari mereka yang berjualan di pinggiran bundaran alun-alun Kudus. Tetapi sekarang keberadaan PKL sudah tertata rapi, penataan tersebut dilakukan agar memberikan keamanan dan kenyamanan para pengunjung. Para PKL di tempatkan saling berhadap-hadapan di jalur lambat di sepanjang jalur Jl Jendral Ahmad Yani dari gang satu sampai gang tiga. Hal itu dilakukan agar ketika jalur dibuka setelah *car free day* tidak mengganggu mobil yang melintas. Karena setelah *car free day* selesai banyak anggota satpol PP yang berkeliling untuk membubarkan para PKL.

Penataan PKL tersebut dibedakan menjadi dua bagian yaitu PKL yang dagangannya bersifat basah dan kering. PKL yang dagangannya bersifat basah seperti pedagang makanan, minuman, makanan ringan. Sedangkan dagangan yang bersifat kering seperti baju, sepatu, kerudung, aksesoris, buku, dan lain sebagainya. Mereka ditata secara berhadap-hadapan, sedangkan yang mendominasi adalah para pedagang makanan. Para pedagang makanan menempati tiga jalur sedangkan satu jalur yang lain di khususkan untuk pedagang yang dagangannya bersifat kering.

Untuk berdagang di *car free day* harus ada rekomendasi dari paguyuban yang mereka dirikan. Setelah itu mereka menyetorkan identitas diri seperti fotocopy ktp dan pas foto ke ketua PKL, kemudian mereka akan diberikan kartu anggota. Para PKL yang berjualan di *car free day* hanya di pungut biaya sebesar Rp 2000,00 untuk biaya kebersihan, selebihnya tidak ada pemungutan biaya apapun.<sup>8</sup>

*Car free day* dilakukan hanya hari minggu saja dari pukul 05.00 sampai pukul 08.00, dan kebanyakan dari PKL yang berjualan di *car free day* juga berjualan di sekitar masjid Agung Kudus pada malam hari, sedangkan yang lainnya berjualan di tempat yang berbeda-beda, dan ada juga yang berjualan online.

Kegiatan perdagangan yang ada pada di *car free day* bisa di lakukan oleh sekelompok PKL. Kelompok tersebut terdiri dari kelas-kelas. Dan kelas tidak hanya menyangkut orang-orang tertentu yang terlibat langsung dalam kegiatan ekonomi, tetapi mencakup pula keluarga mereka. Hal ini mencerminkan pandangan bahwa kedudukan seorang anggota keluarga dalam suatu kelas terkait dengan kedudukan anggota keluarga lain. Karena adanya keterkaitan status seorang anggota keluarga dengan status anggota yang lain maka apabila status kepala keluarga naik, maka status keluarga akan ikut naik. Sebaliknya penurunan status kepala keluarga akan menurunkan pula status keluarganya. Dengan peningkatan pendapatan kepala keluarga maka status ekonomi mereka akan naik. Sebaliknya jika pendapatan kepala keluarga menurun maka perekonomian keluarga tersebut akan menurun.

Pada kegiatan *car free day* ini terdapat 462 PKL yang terdaftar dalam anggota paguyuban diantaranya 256 PKL yang berjualan bermacam jenis makanan dan minuman, sedangkan sisanya sebanyak 206 PKL berjualan selain makanan dan minuman, seperti: aksesoris, baju, sepatu, dan lain-lain. Para PKL yang berada di *car free day* memiliki usia berkisaran 20 tahun – 45 tahun, tetapi rata-rata terbanyak berusia 35 tahun – 40 tahun. Kebanyakan

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan bendahara paguyuban PKL pada acara *car free day* di Kabupaten Kudus (tanggal 10 Januari 2016)

para PKL asli dari kota Kudus dan 20% dari para PKL merupakan para pendatang.<sup>9</sup>

Berdagang di *car free day* sangat potensial, karena diadakan seminggu sekali, hanya kurang lebih 2,5 jam di pagi hari. Selain itu PKL juga bisa berdagang di tempat lain seperti hari-hari biasa. Dibandingkan dengan PKL yang berada di wisata Menara Kudus, di dandangan, gebyar PKL dan lain-lain, penulis lebih cenderung ingin meneliti PKL yang berada di *car free day* karena hanya di lakukan dalam sepekan sekali dan semakin minggu PKLnya semakin bertambah banyak. Bahkan ibu rumah tangga juga ikut berjualan di *car free day*. PKL yang berjualan di acara *car free day* ada yang mengalami peningkatan ekonomi dan ada juga yang perekonomiannya masih sama atau tidak meningkat. Dari beberapa paparan tersebut maka peneliti ingin melakukan penelitian lebih mendalam dengan mengangkat judul “**Analisis Kegiatan PKL Pada Acara Car Free Day Di Alun-Alun Simpang Tujuh Kudus Untuk Meningkatkan Perekonomiannya Dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus PKL Di Acara Car Free Day)**”

## B. Penegasan Istilah

Agar dapat memberikan gambaran yang jelas tentang pengertian yang terkandung dalam judul maka penulis akan memberikan batasan dan penjelasan terhadap istilah – istilah dalam judul skripsi tersebut:

1. Kegiatan

Kegiatan artinya aktivitas, usaha, pekerjaan, kekuatan dan ketangkasan.<sup>10</sup>

2. PKL (Pedagang Kaki Lima)

PKL (Pedagang Kaki Lima) adalah orang (pedagang-pedagang) golongan ekonomi lemah, yang berjualan barang kebutuhan sehari-hari, makanan

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan ketua paguyuban PKL pada acara *car free day* di Kabupaten Kudus (tanggal 8 April 2016)

<sup>10</sup> Poerwodarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hlm. 486.

atau jasa dengan modal yang relatif kecil, modal sendiri atau modal orang lain baik berjualan ditempat terlarang ataupun tidak.<sup>11</sup>

3. *Car Free Day*

*Car Free Day* adalah hari bebas kendaraan bermotor yang bertujuan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat untuk menurunkan ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan bermotor.<sup>12</sup>

4. Meningkatkan Perekonomian

Meningkatkan Perekonomian adalah usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang seringkali diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan riil per kapita.<sup>13</sup>

5. Perspektif

Perspektif adalah suatu cara pandang terhadap suatu masalah yang terjadi, atau sudut pandang tertentu yang digunakan untuk melihat suatu fenomena.<sup>14</sup>

6. Ekonomi Syariah

Ekonomi Syariah adalah ilmu ekonomi yang berdasarkan nilai atau ajaran Islam.<sup>15</sup>

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan dikaji oleh peneliti adalah sebagai berikut:

Bagaimana analisis kegiatan PKL pada acara *car free day* di Alun-alun Simpang Tujuh Kudus untuk meningkatkan perekonomiannya dalam perspektif ekonomi syariah?

---

<sup>11</sup> Buchari Alma, *Dasar-Dasar Bisnis dan Pemasaran*, Alfabeta, Bandung, 1992, hlm 137.

<sup>12</sup> [www.kuakap.com/2015/11/pengertian-car-free-day-hari-bebas.html?m=1](http://www.kuakap.com/2015/11/pengertian-car-free-day-hari-bebas.html?m=1).

<sup>13</sup> Irwan dan Suparmoko, *Ekonomika Pembangunan*, BPFE, Yogyakarta, 1998, hlm. 5.

<sup>14</sup> Nanang Martono, *Sosiologi Perubahan Sosial*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 56.

<sup>15</sup> Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah*, Pustaka Setia, Bandung, 2015, hlm. 19.

**D. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan jawaban atas pertanyaan dari rumusan masalah yaitu:

Untuk menganalisis kegiatan PKL pada acara *car free day* di Alun-alun Simpang Tujuh Kudus untuk meningkatkan perekonomiannya dalam perspektif ekonomi syariah.

**E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi beberapa pihak baik secara teoritis maupun praktis.

**1. Secara teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, meningkatkan pengetahuan dan wawasan bagi pengembangan ilmu ekonomi.

**2. Secara praktis****a. Bagi pemerintah Kabupaten Kudus**

Diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi kehidupan sosial ekonomi PKL, sehingga pemimpin lembaga atau institusi dapat mengambil langkah-langkah dalam hal penanganan masalah yang ditimbulkan oleh PKL.

**b. Bagi Masyarakat**

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat umum mengenai kegiatan PKL yang tidak hanya menyebabkan berbagai masalah seperti kemacetan, ketertiban, kebersihan dan keindahan kota menjadi berkurang. Tetapi dengan adanya PKL berarti membuka peluang lapangan pekerjaan baru.

**F. Sistematika Penulisan Skripsi**

Sistematika penulisan skripsi atau penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran serta garis-garis besar dari masing-masing bagian atau yang saling berhubungan, sehingga nantinya akan diperoleh penelitian yang sistematis dan ilmiah. Berikut adalah sistematika penulisan skripsi yang akan penulis susun :

### 1. Bagian awal

Bagian muka ini, terdiri dari: halaman judul, halaman nota persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman surat pernyataan, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, halaman abstrak, halaman daftar isi, dan halaman gambar, halaman tabel.

### 2. Bagian isi

Pada bagian ini memuat garis besar yang terdiri dari lima bab, Kelima bab itu adalah sebagai berikut :

#### **BAB I : Pendahuluan**

Bab ini meliputi latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dari penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

#### **BAB II : Landasan Teori**

Bab ini berisi tentang teori ekonomi informal, PKL, perdagangan, modal kerja, produksi, produk, pendapatan, pertumbuhan ekonomi, penelitian terdahulu, serta kerangka berpikir.

#### **BAB III : Metode Penelitian**

Bab ini berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, subyek dan obyek penelitian instrumen penelitian, sumber data, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data dan analisis data.

#### **BAB IV : Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

Bab ini berisi tentang gambaran umum obyek penelitian, gambaran umum responden, analisis data serta pembahasan.

#### **BAB V : Penutup**

Bab ini berisi tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian, saran dan penutup.

### 3. Bagian akhir meliputi: daftar pustaka, daftar riwayat pendidikan dan lampiran-lampiran.